

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengetahuan merupakan salah satu unsur yang tentunya tidak dapat terpisahkan dari manusia. Sejak dalam kandungan hingga dewasa dan lanjut usia, seseorang mengalami proses pendidikan oleh orang tua, masyarakat dan lingkungan. Pendidikan tidak selalu berarti hanya dapat diperoleh melalui Madrasah, universitas atau lembaga formal lainnya, tetapi pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan mencakup beberapa unsur yang berkaitan erat. .

Kegiatan pendidikan bertujuan untuk menjadikan peserta didik atau siswa menjadi manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia, sehat, terpelajar, beriman, mengembangkan keterampilan dalam pendidikan kehidupan berbangsa, membentuk sebuah watak dan peradaban dalam bangsa. Mereka dilatih sebagai warga negara yang memiliki kompetensi, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab. Seseorang sangat membutuhkan pendidikan dalam hidupnya. Melalui pendidikan, seseorang melalui proses kebangkitan dan berusaha terus menggali dan mengembangkan nilai potensi dirinya dengan metode pendidikan atau metode lain yang diterima secara sosial seperti perubahan.

Sistem pendidikan secara nasional merupakan seluruh komponen sebuah pendidikan yang saling berhubungan erat untuk mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan nasional (Iuliana: 2007). Sistem pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk memenuhi tuntutan globalisasi dengan menjamin pemerataan dalam mendapat kesempatan mengancam pendidikan, meningkatkan kualitas mutu dan memiliki relevansi pendidikan, serta meningkatkan efisiensi manajemen pengelolaan pendidikan. Proses globalisasi tidak dapat dipandang secara terpisah dari perubahan, terutama perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sudut pandang umum budaya adalah kumpulan kepercayaan, nilai dan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tertentu, sehingga budaya global dimulai pada era globalisasi saat ini. Budaya global yang dihadapkannya dapat

diartikan sebagai modernis. Pada saat yang sama, modernitas berarti masyarakat yang modern, memiliki gaya hidup yang modern, ekonomi yang modern, budaya yang modern, dan pendidikan yang modern pula.

Di era globalisasi, di mana permasalahan semakin kompleks dan persaingan SDM atau sumber daya manusia tentunya semakin ketat, tenaga kerja yang terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkembangkan sumber daya yang dimiliki manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Kehadirannya tidak bisa dihindari, terutama dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting dalam membantu mewujudkan masyarakat untuk masa depan yang berbasis ilmu pengetahuan, dan proses pendidikan dan pembangunan dicapai melalui pendidikan.

Terlepas dari berbagai harapan-harapan tersebut di atas, Indonesia sebenarnya banyak menghadapi masalah yang mendasar, yaitu kualitas pendidikan yang seringkali buruk. Hal ini disebabkan buruknya sistem pendidikan yang ada di Indonesia (Iuliana: 2007). Menurut survey yang telah dilakukan oleh Political and Economic Risk Consulting (PERC), sistem pendidikan Indonesia adalah yang termiskin di Asia, menempati urutan ke-12 dari 12 negara yang disurvei. Mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah karena sistem dalam pendidikan yang terpusat dan peran serta masyarakat terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan di Madrasah. Kebijakan terpusat di mana semua urusan, tugas, dan wewenang pendidikan dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah pusat dan diatur di tingkat pusat yang terperinci, memastikan bahwa Madrasah tetap memiliki kemandirian, kreativitas, dan inisiatif untuk membuat kebijakan yang relevan tanpa persyaratan tertentu. Pengelolaan birokrasi pendidikan di atas. Selama ini keterlibatan masyarakat (stakeholder) berupa dukungan dana yang lebih besar, partisipasi yang lebih sedikit dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk memastikan bahwa Madrasah tidak menanggung beban tanggung jawab masyarakat (stakeholder). Diusulkan sebagai bentuk operasi desentralisasi pendidikan untuk kurikulum dan hasil, MBS menawarkan wawasan baru ke dalam sistem saat ini. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku

individu atau kelompok yang ditujukan untuk perbaikan melalui pendidikan dan pelatihan (Nurholis, 2003:37).

Oleh karena itu, dalam hal ini menyangkut proses pendidikan atau perbuatan mendidik. Bantuan terpenting bagi setiap orang dalam membangun kehidupan ini adalah pendidikan. Pendidikan membuat manusia masa kini berbeda dengan masa lalu. Akibat dari era globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengubah segala bidang kehidupan manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggapi dampak global ini dengan mendidik tenaga kerja berkualitas tinggi, kompetitif dan terampil baik secara nasional maupun global. Upaya mengembangkan karyawan yang berkualitas melalui pendidikan.

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, upaya pendidikan telah dilakukan dalam bentuk, jenis dan jenisnya, namun pendidikan yang dapat menghasilkan sebuah SDM atau sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi mungkin belum secara total terwujud. Oleh sebab itu, harus ada perubahan paradigma seperti dari subordinasi menjadi pemberdayaan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Salah satu masalah yang ada dalam pendidikan yang dihadapi Negara Indonesia adalah di mana rendahnya sebuah mutu pendidikan yang ada pada semua jenjang dan satuan pelajaran, terutama pada pendidikan dasar dan menengah atas. Lembaga pendidikan telah melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan, seperti mutu guru, landasan fisik dan teknis, kurikulum, serta pembelian buku dan alat ajar (Nurholis, 2003:40). Masalah pendidikan Indonesia yang sampai saat ini belum terpecahkan tidak akan terpecahkan kecuali peran semua kelas sosial dilibatkan. Inilah mengapa dukungan semua orang sangat penting dalam keadaan dan lingkungan pendidikan saat ini.

Tiga faktor tidak secara seragam meningkatkan kualitas pendidikan. Pertama, kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya menggunakan pendekatan analisis biaya-manfaat yang tidak diterapkan secara konsisten. Kedua, pendekatan penyelenggaraan pendidikan pedesaan bersifat sentralistik, yang membuat Madrasah sangat bergantung pada birokrasi sebagai organisasi pendidikan. Ketiga, masyarakat terutama orang tua siswa jarang berpartisipasi

dalam pendidikan. Dukungan orang tua selama ini hanya membantu dalam rupa bantuan dana, sehingga para orang tua tidak memiliki rasa cinta terhadap Madrasah dan pendidikan, sebaliknya Madrasah tidak memikul tanggung jawab masyarakat atas hasil pendidikan (Departemen Pendidikan, 2000:2).

UU Tata Usaha Daerah yang mulai diberlakukan pada tanggal 01 bulan Januari 2001 telah dikaji secara mendalam sehubungan dengan pembahasan desentralisasi kekuasaan negara. Pendidikan merupakan bidang yang perlu didesentralisasikan ke kota atau pemerintah daerah melalui desentralisasi pendidikan. Diharapkan isu-isu utama pendidikan - kualitas, pemerataan, efisiensi dan relevansi manajemen - dapat di atasi (Nurholis, 2003:40). Desentralisasi pendidikan adalah pengakuan bahwa proses pembelajaran tidak berjalan mulus jika semuanya dikelola secara terpusat.

Rendahnya sebuah pendidikan yang sedang dihadapi Negara kita Indonesia saat ini adalah tentang manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan alat untuk mengelola sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan (Nurholis, 2003:40). Membangun tenaga kerja berkualitas tinggi melalui desentralisasi merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab. Pendidikan nasional merupakan inti pembangunan sumber daya manusia yang sangat strategis. Mutu sebuah pendidikan hanya bisa ditingkatkan jika manajemen pendidikan nasional menjadi bagian dari manajemen nasional (Tillaar, 2005:110).

Dalam laporannya, Bank Dunia mendukung pelebagaan dan desentralisasi pendidikan dasar. Bank Dunia telah mengidentifikasi empat potensi tantangan bagi pembangunan Indonesia, khususnya pendidikan dasar. Pertama, sistem organisasi yang sangat kompleks di tingkat (SD) Madrasah dasar, dan kedua, manajemen Madrasah yang terlalu sentralistik. Tingkat menengah, ketiga, puluhan kotak dan kakunya proses pendanaan di tingkat tersebut (SD dan SLTP) dan keempat, manajemen yang tidak efektif di tingkat Madrasah (Tillaar, 2005:110).

Pemerintah terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sebuah pendidikan untuk mencetak talenta-talenta yang mampu menghadapi tantangan zaman teknologi, informasi dan globalisasi. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak boleh berubah. Karena sektor pendidikan memiliki

pemangku kepentingan lain seperti orang tua (masyarakat), Madrasah (lembaga pendidikan) dan lembaga sosial lainnya (misalnya bisnis atau industri), pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien diharapkan dari kerjasama ini. Oleh karena itu kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan tentunya menjadi sangat penting, terutama dalam rangka pelaksanaan prinsip desentralisasi di bidang manajemen pendidikan. Seperti telah disinggung di atas, strategi manajemen pendidikan yang mengedepankan sebuah kerjasama antar berbagai pihak yang lebih dikenal dengan manajemen Madrasah kolaboratif, kemudian dikembangkan dan berkembang menjadi model manajemen Madrasah yang disebut manajemen berbasis Madrasah (MBM) (Duyosubroto, 2004:195).

UU no. "Pada sistem pendidikan negara". Penjelasan pasal 51 tahun 20/2003 menyebutkan "Pengelolaan sarana pendidikan praMadrasah, dasar, dan menengah mengatur prinsip-prinsip Madrasah/madrasah". pengelolaan". Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah konsep manajemen Madrasah untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Secara konseptual, MBS dapat dilihat sebagai alternatif sebuah pilihan yang formal untuk mengelola susunan pendidikan yang terdesentralisasi dengan memberikan tempat kepada Madrasah sebagai unit fundamental perbaikan. Manajemen TK -Model administrasi Madrasah adalah model untuk penciptaan dan implementasi program pendidikan di Madrasah yang ada, termasuk pengantar dan implementasi layanan pendidikan. Publik dan bertanggung jawab terbuka, mengabaikan tujuan pendidikan nasional dan bertanggungjawab dalam mencapai senuah tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efisien.

Manajemen Madrasah adalah pendidikan politik, evaluasi, penilaian kualitas dan hasil pendidikan dan Madrasah. Desentralisasi dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kebijakan untuk pendidikan dengan menetapkan berbagai prinsip-prinsip yang mengintegrasikan demokrasi, keterlibatan masyarakat, kesetaraan, dan beragam kepentingan dan kebutuhan lokal ke dalam operasi Madrasah.

Menurut Nurkolis, tata kelola Madrasah adalah pendelegasian wewenang

kepada Madrasah untuk membuat keputusan tentang alokasi dan penggunaan sumber daya sesuai dengan aturan pertanggungjawaban sumber daya. Personil merupakan komponen utama yang diperhatikan dalam manajemen Madrasah, antara lain kepala Madrasah, guru dan staf, siswa, kurikulum dan sarana prasarana Madrasah. Karena jurusan ini merupakan bagian terpenting dari kegiatan pendidikan Madrasah. Pendidikan yang berkualitas berperan dalam mempromosikan (SDM) sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan berdaya saing yang tinggi. Dengan kata lain, pendidikan memiliki peran sangat bagus dalam menciptakan SDM / sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Pendidikan yang ada di Indonesia ini belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Permasalahannya adalah kualitas yang rendah dalam proses dan hasil pendidikan pada setiap jenjang dan fasilitas pelatihan yang ada. Pemerintah telah berulang kali berupaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Salah satunya adalah pengenalan manajemen berbasis Madrasah (MBS), juga dikenal sebagai manajemen peningkatan mutu berbasis Madrasah (MPMBS). Secara umum, MPMBS didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi kepada Madrasah di mana semua warga Madrasah berpartisipasi langsung dalam peningkatan mutu Madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan mendorong pengambilan keputusan secara kooperatif. (Nurkolis, 2003:9)

Konsep "Manajemen Berbasis Sekolah" pertama kali muncul dalam konteks pendidikan umum yang diperkenalkan sebagai pendekatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Ide dasarnya adalah memberikan otonomi dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan perencanaan program pembelajaran. Konsep ini telah diadopsi secara luas di berbagai negara dengan sistem pendidikan umum.

Meskipun sekolah dan madrasah keduanya merupakan institusi pendidikan, mereka sering kali memiliki karakteristik yang berbeda. Sekolah umum biasanya mencakup kurikulum yang lebih umum dan beragam, sementara madrasah cenderung memiliki fokus yang lebih spesifik pada pendidikan agama atau Islam. Oleh karena itu, pendekatan manajemen yang diterapkan di sekolah

dan madrasah dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing institusi.

Istilah "Manajemen Berbasis Sekolah" telah menjadi standar dalam literatur pendidikan dan praktik manajemen pendidikan di banyak negara. Penggunaan istilah ini mencerminkan penggunaan yang luas dan penerimaan oleh komunitas pendidikan internasional. Sementara "Manajemen Berbasis Madrasah" mungkin digunakan dalam konteks tertentu, tetapi mungkin tidak sepopuler atau seumum "Manajemen Berbasis Sekolah".

Dengan demikian, penggunaan istilah "Manajemen Berbasis Sekolah" bukan "Manajemen Berbasis Madrasah" mungkin tercermin dari sejarah, konteks, dan penerimaan yang lebih luas di masyarakat pendidikan internasional.

Dengan menunjuk Madrasah sebagai unit utama perbaikan, MBS atau MPMBS secara konseptual dapat dipahami sebagai sebuah pilihan formal alternatif dapat digunakan untuk mengelola struktur pendidikan yang telah terdesentralisasi. Konsep ini menempatkan redistribusi kekuatan politik sebagai faktor yang paling mendasar dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Dalam pengertian ini, MBS adalah cara mendorong pimpinan Madrasah untuk bertanggung jawab atas kualitas anak didiknya. Untuk itu kepala Madrasah harus membuat program pendidikan holistik yang akan memenuhi semua kebutuhan siswa di Madrasah (Malik; 2002). Ia juga berpendapat bahwa semua staf harus dilibatkan dalam membuat program yang lebih efektif karena mereka paling mengetahui kebutuhan siswa. Karena pendidikan merupakan aspek fungsional dari kehidupan setiap orang dan pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis, maka melalui pendidikan diharapkan keberdayaan, kedewasaan dan kemandirian masyarakat serta kualitas bangsa secara keseluruhan akan tercapai. kehidupan bangsa. Di Indonesia, pendekatan MBS diposisikan tidak hanya sebagai alternatif tetapi juga sebagai kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik selama ini. Pendidikan terpusat memberdayakan pemimpin Madrasah untuk belajar secara mandiri, mengelola kepemimpinan, mengembangkan institusi, mengembangkan program, menyediakan sumber daya pengajaran, mengalokasikan sumber daya, dan yang terpenting, membangun keterlibatan masyarakat dengan Madrasah lokal, bukan pelatihan. Peningkatan

dampak Madrasah membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, dewan Madrasah (kepala Madrasah, guru, orang tua dan tokoh masyarakat) dan siswa. Pengambilan keputusan bersama oleh pemangku kepentingan di tingkat Madrasah adalah kunci penerapan MBS (Malik: 2002).

Sebagai unit utama pelaksana kegiatan belajar mengajar, administrasi pendidikan bertujuan untuk memperkuat Madrasah. Tujuannya adalah untuk menciptakan era otonomi di mana Madrasah mandiri dan kreatif, menciptakan lingkungan yang kompetitif antar Madrasah di daerah, dan bertanggung jawab terhadap disiplin pendidikan, khususnya bagi orang tua dan masyarakat. Tata kelola pendidikan harus lebih transparan dalam praktiknya, akuntabel, memaksimalkan keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan mengelola semua sumber daya yang tersedia untuk Madrasah dan masyarakat untuk memaksimalkan prestasi siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Jati, 2001: 19-20).

Untuk menerapkan MBS secara efektif dan efisien, pimpinan Madrasah perlu memiliki pandangan yang lebih luas terhadap Madrasah dan pendidikan. Keteladanan dan hubungan antarmanusia perlu ditingkatkan sebagai modal untuk mencapai kehormatan dan perhatian para pelaku, semangat belajar, disiplin kerja dan iklim kerja yang bersahabat di dalam lembaga. Sebagai pemimpin, kepala Madrasah harus mampu meningkatkan proses belajar mengajar dengan memenuhi tanggung jawab kepemimpinan, pengelolaan kelas, pengembangan guru dan memberikan umpan balik yang positif. Kepala Madrasah juga harus melakukan benchmarking Madrasah untuk berbagi ide, bertukar pikiran dan memasukkan saran kepemimpinan dari kepala Madrasah lain untuk meningkatkan Madrasah yang dipimpinnya.

Guru yang berperan dalam mensukseskan manajemen Madrasah harus meningkatkan dan mengembangkan potensi profesionalnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peran guru dalam penerapan MBS dapat berupa meminta kreativitas guru dalam kegiatan belajar mengajar atau memperbaiki pengelolaan kelas. Guru adalah panutan dan panutan langsung bagi siswa di kelas. Oleh karena itu, guru harus siap untuk melakukan semua pekerjaan mengelola dan mempersiapkan isi kursus. Guru juga harus mengatur pelajaran dengan baik

sesuai dengan jadwal pelajaran, pembagian tugas antar siswa, ketertiban dan keteraturan dalam kelas, penataan tempat siswa dan penataan bahan ajar. Guru harus benar-benar memahami praktik profesinya agar profesinya dikenal baik di masyarakat dan dapat mengoptimalkan pendidikan manajemen Madrasah (Malik: 2002).

Implementasi MBS yang ideal harus mengikuti spesifikasi MBS dan melalui tahapan implementasi MBS. Perencanaan dan persiapan implementasi MBS yang tepat akan membantu keberhasilan program Anda. Hal ini mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan di samping peningkatan kesadaran di antara warga Madrasah dan akuntabilitas Madrasah. Berikut kesimpulan yang diambil dari studi MBS Bank Dunia di beberapa negara. Di Nikaragua, kami menemukan bahwa motivasi guru terkait dengan partisipasi MBS dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterlibatan terus guru dan siswa membuat perbedaan positif dalam pengalaman belajar siswa. (Mulyasa, 2004:25).

Manajemen mutu tingkat Madrasah berfokus pada strategi manajemen aktif untuk dapat meningkatkan kualitas dalam mengelola kelembagaan, alokasi sumber daya, dan implementasi rancangan kurikulum dan meningkatkan prestasi siswa di Madrasah. Kebijakan pengelolaan Madrasah yang terdesentralisasi didasarkan pada membawa masyarakat lebih dekat ke Madrasah dan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan kebutuhan mereka untuk membuat keputusan yang lebih efektif tentang masalah kebijakan pendidikan di Madrasah. Untuk mengelola sumber daya Madrasah dalam proses peningkatan mutu pendidikan, Madrasah, masyarakat, dan pemerintah harus bekerjasama secara erat dalam tanggung jawabnya masing-masing, dan hal ini didorong oleh keinginan untuk menjadikan Madrasah mandiri untuk partisipasi yang aktif dan dinamis. .

Untuk itu, Madrasah harus mampu menerjemahkan dan memahami implikasi kebijakan pendidikan makro dan memahami kondisi lingkungan (kekuatan dan kelemahan). Madrasah perlu menerjemahkannya ke dalam kebijakan mikro berupa program-program prioritas yang dapat dilaksanakan dan dilaksanakan melalui perencanaan. Madrasah mengevaluasi siswa berdasarkan visi dan misi mereka. Selain itu, sebagai penyelenggara pendidikan Madrasah perlu menetapkan sasaran mutu (dalam arti luas) yang ingin dicapai pada waktu

tertentu, merencanakannya, melaksanakannya dan mengevaluasinya sendiri, serta menetapkan sasaran mutu untuk tahun berikutnya. (Mulyasa, 2004:25).

Hal ini memungkinkan Madrasah untuk mandiri tetapi tetap bertanggung jawab atas kebutuhan belajar siswa dan masyarakatnya dalam definisi kebijakan nasional. Dalam konteks ini, Bappenas dan tim teknis Bank Dunia percaya bahwa pemberdayaan Madrasah dengan memberikan sebuah otonomi yang kuat dan lebih besar, selain menunjukkan ketanggapan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, dapat dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, kualitas dan pemerataan pendidikan. memiliki. Oleh karena itu, MBS dapat dilihat sebagai gerakan pemberdayaan Madrasah dengan memberdayakannya dalam rangka upaya peningkatan kualitas mutu dan pemerataan pendidikan nasional (Mulyasa, 2004:25).

MBS juga merupakan manajemen Madrasah dalam program desentralisasi dalam bidang pendidikan yang dapat dilihat dengan otonomi luas pada tingkat Madrasah, partisipasi sosial yang tinggi dan dalam kebijakan pendidikan secara nasional. Tujuan otonomi adalah memberikan kebebasan kepada Madrasah untuk mengelola dan merespon lebih baik kebutuhan lingkungan setempat dengan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas. Masyarakat juga perlu lebih memahami kompleksitas pendidikan dan terlibat dalam mendukung dan mengawasi pengelolaannya. Madrasah juga harus mempertimbangkan kebijakan pendidikan nasional, yang merupakan prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Madrasah harus bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Karena keduanya merupakan organisasi pendidikan Madrasah. MBS menawarkan Madrasah kesempatan untuk memberikan siswa pendidikan yang lebih baik dan lebih relevan. Manajemen pendidikan memerlukan otonomi daerah untuk memungkinkan Madrasah meningkatkan kinerja staf, memastikan keterlibatan langsung kedua belah pihak dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan Madrasah.

Otonomi Madrasah juga berfungsi untuk memastikan kesepakatan umum tentang pemberdayaan Madrasah. Kami percaya bahwa keputusan tentang pemberdayaan Madrasah harus dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab langsung yang terkena dampak implementasi kebijakan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan jika memungkinkan. Akibat dari kebijakan ini yaitu guru, kepala Madrasah. MBS memungkinkan penggemar Madrasah untuk lebih memahami semua acara Madrasah. Inti Madrasah ini kemudian menjadi organisasi tidak terstruktur yang disebut Dewan Madrasah, yang anggotanya meliputi kepala Madrasah, guru, administrator, orang tua/wali, warga masyarakat, dan siswa Mulyasa, 2004:25).

Pada dasarnya MBS adalah strategi manajemen pendidikan Madrasah yang menekankan pada penggerakan dan penggunaan sumber daya internal dan lingkungan Madrasah secara efisien dan efektif untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. MBS merupakan bentuk otonomi pengelolaan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana kepala Madrasah/madrasah dan guru didukung oleh komite Madrasah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Madrasah Aliyah Negeri Tapanuli Tengah terdiri dari satu buah. MAN 1 Tapanuli-Tengah (Barus) 2. MAN 2 Tapanuli Tengah (Sorkam) 3. MAN 3 (Pandan) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah madrasah negeri Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, madrasah telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari berbagai perlombaan di mana madrasah tersebut berhasil meraih penghargaan di berbagai bidang, diantaranya mengikuti Lomba Ilmiah Madrasah (KSM) Tingkat Provinsi mewakili kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM).

Dengan semakin ketatnya persaingan antara madrasah dan Madrasah umum serta kemajuan teknologi yang maju, maka capaian yang ada saat ini belum cukup untuk mempertahankan status Madrasah Aliyah di Tapanuli Tengah sebagai lembaga pendidikan menengah (madrasah) Islam di masa mendatang. Orang-orang lebih tertarik pada Madrasah negeri daripada madrasah karena mereka percaya bahwa Madrasah negeri memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang dalam hal penyediaan infrastruktur dan pengajaran.

Diperlukan strategi yang sistematis untuk memprediksi dan menghadapi persaingan SMA di masa depan. Oleh karena itu, penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah merupakan cara yang paling efektif dan tepat untuk mengembangkan potensi madrasah, dan juga diterapkan di Madrasah

Aliyah Tapanuli tengah, sehingga potensi yang ada perlu dimanfaatkan lebih lanjut. Sehingga dapat menjadi simbol bagi Madrasah Negeri Tapanuli Tengah yang tidak dimiliki oleh Madrasah lain.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan sebagai berikut. Pertama, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) merupakan penelitian dan topik penelitian yang menarik karena menentukan dasar dan arahnya. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan madrasah. Kedua, rata-rata madrasah belum cukup menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah, namun di madrasah Aliyah Negeri Tapanuli Tengah, pada survei awal peneliti menemukan bahwa Madrasah Aliyah sudah banyak meraih prestasi-prestasi baik pada bidang akademik maupun non-akademik seperti memenangkan berbagai perlombaan di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

Selain latar belakang penelitian diatas yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu juga menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang relevan yang telah kami rangkum dalam table berikut:

Tabel 1.1 : Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyono Anajih (2019)	Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) di MTs Mafatihul Huda Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon	MT Mafatihul Huda Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik karena madrasah telah menunjukkan mutu pendidikan bagi peserta didiknya dan saat ini diperlukan adanya Manajemen Peningkatan Mutu yang dilaksanakan di madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2	Muhamad Churdaini (2020)	Implementasi Manajemen Madrasah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo	(1) otonomi Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 17 Purworejo dilaksanakan sesuai aturan; dari peraturan yang berlaku. (2) Keterlibatan Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP N 17 Purworejo dilakukan melalui keterlibatan seluruh stakeholder terkait di Madrasah. Partisipasi dalam kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan Madrasah. (3) Kepemimpinan kepala Madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan sudah terbangun dengan baik di SMP N 17 Purworejo. Klien dapat menyeimbangkan

			peran mereka sebagai pemimpin dan manajer. (4) Upaya peningkatan mutu pembelajaran di SMP N 17 Purworejo oleh staf dilakukan dengan organisasi yang kuat dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan secara optimal.
3	Anan Nisoh (2019)	Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah (Studi Komparasi Lembaga Pendidikan Di Indonesia Madrasah Pembangunan UIN Jakarta) dan Thailand (Ma'had Al-Ulum Adiniyah Pohontanjong Ruso Narathiwat)	Standar Program yang berkaitan dengan program mengacu kepada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing tetapi menambah atau memperkayakan cirrikhas dan penguatan kajian keislaman sebagai penguatan lokal. Secara keseluruhan kesimpulan akhirnya adalah melalui pengembangan mutu pembelajaran dan kelembagaan bermutu itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang beruniversal.
4	Hanifah Hanifah, dkk (2021)	Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di MTs Ma'arif Sempor	1) otonomi madrasah dalam peningkatan mutu madrasah menggunakan delapan standar nasional; 2) partisipasi madrasah dalam peningkatan mutu madrasah melalui upaya komite, masyarakat, dan warga madrasah; 3) kepemimpinan kepala madrasah terbagi menjadi lima yaitu: kepala madrasah sebagai motivator, kepala madrasah sebagai inovator, kepala madrasah sebagai pendidik, kepala madrasah sebagai pengawas, kepala madrasah sebagai pemimpin; 4) Kerjasama tim yang dilakukan oleh madrasah adalah berkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan.
5	Riyuzen Praja Tuala (2016)	Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah (Studi Kasus di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dan Madrasah Aliyah Negeri I (MAN MODEL) Bandar Lampung)	Manajemen Mutu di SMA Al-Kautsar dan MAN 1 Bandar Lampung memiliki berbagai kesamaan terkait dengan standar isi, standar proses dan standar Tendik; untuk Standar Isi dalam perencanaannya dimulai dari pembentukan Tim Pengembang Kurikulum, perumusan kerangka dasar kurikulum berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan teoritis, penyusunan struktur kurikulum dan standar kompetensi berdasarkan Kurikulum Nasional. Seluruh perencanaan standar isi tersebut diimplementasikan dalam bentuk perumusan visi, misi, tujuan dan program sekolah. Evaluasi standar isi dilakukan terkait dengan rencana dan implementasi visi, misi, tujuan dan program sekolah.

			<p>Manajemen mutu standar proses dimulai dari penyusunan silabus, RPP, bahan ajar dan alat evaluasi yang dilakukan oleh guru. Pelaksanaan standar proses dilakukan oleh guru dalam rangka mengimplementasikan standar isi dan seluruh rencana pembelajaran. Evaluasi proses dilakukan oleh guru meliputi evaluasi perencanaan proses yang sudah dibuat, evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Manajemen mutu pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk memenuhi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik melalui rekrutmen dan seleksi. Untuk MAN 1 Bandar Lampung rekrutmen dan seleksi adalah kewenangan Kementerian Agama sedangkan SMA Al- Kautsar dilakukan oleh pihak yayasan. Pelaksanaan program peningkatan mutu tenaga pendidik di MAN 1 Bandar Lampung mengacu pada kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan SMA Al-Kautsar lebih fokus pada otonomi sekolah dan yayasan. Untuk mengakomodir kuantitas dan kualitas guru, SMA Al-Kautsar dan MAN 1 Bandar Lampung melakukan evaluasi pada tenaga pendidik sehingga diperoleh data jumlah guru yang memenuhi standar minimal, guru yang lulus uji kompetensi, guru bersertifikat, dan guru yang menguasai IT.</p>
6	Ahmad Fahmi dan Amin Haedari (2020)	Strategi Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Manajemen Berbasis Madrasah Di Mi Swasta Al Wasliyah Sumber	<p>Peningkatan mutu Pendidikan dasar / MI diawali dari komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, diikuti dengan peningkatan sumberdaya guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan manajemen kepala sekolah. Penerapan Stategi dalam meningkatkan mutu Pendidikan memerlukan keterlibatan seluru helemen organisasi, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan atau staf, bahkan pihak pihak eksternal seperti otang tua wali, siswa, pemerintah, masyarakat dan steakholder.</p>
7	Muli Prima Aldi (2018)	Aktualisasi Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Madrasah	<p>Mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral dalam pendidikan nasional. Karena mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia, maka sangat penting bagi</p>

		(MPMBM)	pembangunan nasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas saat ini. Pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul jika ada lembaga pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan titik strategis dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.
8	Karseno Handoyo, dkk (2021)	Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah	Hasil penelitian Konsep Manajemen Syariah Berbasis Sekolah (MBS) yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sukoharjo dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Sukoharjo sudah cukup baik. Beberapa komponen dalam konsep MBS dapat dilaksanakan dengan baik, seperti kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, kepala sekolah telah mampu menjalankan peran pendidik, pengelola, pemimpin, administrator, pengawas, inovator dan motivator dengan baik. Selain itu, peran aktif masyarakat juga terlihat dari bantuan yang diberikan kepada MIN 2 Sukoharjo dan MIN 4 Sukoharjo baik materi maupun non materi.
9	Andy (2021)	Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Harisul Khairaat Bumi Hijrah Tidore Provinsi Maluku Utara	(1) Kualitas pendidikan madrasah di Pondok Pesantren Harisul Khairaat dengan penerapan MBM berdampak positif terhadap input, proses, dan output pendidikan, luar negeri dan alumni tersebar di dunia kerja. (2) Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di Pondok Pesantren Harisul Khairaat Bumi Hijrah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
10	Fajri Dwiayama	Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Di Mtsn Watampone Kabupaten Bone	Hasil kajian menemukan bahwa manajemen berbasis madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone sudah terlaksana dengan baik, melalui tahapan perencanaan dengan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang melibatkan seluruh komponen madrasah. Pelaksanaan program kerja dilakukan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing. Kepemimpinan madrasah dilakukan oleh kepala madrasah. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan sebagai acuan

		<p>untuk perbaikan selanjutnya. Sistem informasi madrasah digunakan untuk mendapatkan informasi perkembangan pendidikan. Peningkatan mutu di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Watampone dilakukan dengan memenuhi semua kriteria standar nasional pendidikan dan meningkatkan prestasi siswa. Dalam pemenuhan kriteria pendidikan nasional yang berstandar, dipastikan dengan melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut melalui kepemimpinan kepala madrasah yang kuat, kerjasama yang baik antar komponen madrasah, dan pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang profesional.</p>
--	--	---

Beberapa penelitian di atas seluruh mengkaji mengenai implementasi mutu pada madrasah, akan tetapi memiliki fokus yang berbeda-beda, dalam penelitian ini memiliki perbedaan tersendiri dimana penelitian dilakukan di 3 madrasah Negeri di kabupaten Tapanuli Tengah dan berfokus kepada teori Bailey yang mengungkapkan karakteristik tata Kelola MBS.

Dari berbagai kajian teori dan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah merupakan tugas khusus, sehingga pelaksanaan manajemen Madrasah sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Atas uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul **“Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (Studi Multi Situs di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah)”**.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka yang telah diberikan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (Studi Multi-Situs pada MAN di Kabupaten Tapanuli Tengah)”**. Peneliti fokus pada penelitian, membuat pembahasan menjadi lebih fokus dan detail. Tujuan penelitian ini adalah manajemen peningkatan mutu Berbasis Madrasah.

Mutu memiliki banyak arti, sebagai konsep absolut, mutu dipahami sebagai dasar untuk mendapatkan kualitas dan keindahan yang baik, dan hal yang nyata memiliki standar yang tinggi dan merupakan idealisme yang tak tertandingi. (Salis, 2011: 51-52). Definisi ini menjelaskan bahwa mutu yang berkualitas sebagai produk yang diproduksi dengan sempurna dan mahal. Manajemen berpusat pada Madrasah adalah model manajemen pendidikan yang memberikan kewenangan (otonomi) lebih kepada Madrasah atas penyelenggaraan Madrasah melalui partisipasi warga Madrasah dan masyarakat setempat, sejalan dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Manajemen berbasis Madrasah dapat dikatakan sebagai keseimbangan sumber daya yang dicapai Madrasah secara mandiri dengan melibatkan secara langsung semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang terkait dengan Madrasah dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan Madrasah.

Berdasarkan fokus yang ada dalam penelitian, maka peneliti menetapkan sub focus dalam penelitian tentang “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (Studi Multi-Situs pada MAN di Kabupaten Tapanuli Tengah)”. Sub focus dalam penelitian ini yaitu 1) adanya keragaman dan pola penggajian guru, 2) otonomi manajemen sekolah, 3) pemberdayaan guru secara optimal, 4) pengelolaan sekolah secara partisipatif, 5) system yang disentralisasikan, 6) sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam menentukan pilihan, 7) hubungan kemitraan (partnership) antara dunia bisnis dan dunia pendidikan, 8) akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri, 9) pemasaran sekolah secara kompetitif.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah?

3. Bagaimana Evaluasi Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah?
4. Apa Factor Pendukung dan Penghambat dalam Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Perencanaan Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Menganalisis Pelaksanaan Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Menganalisis Evaluasi Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Menganalisis Factor Pendukung dan Penghambat dalam Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di MAN Kabupaten Tapanuli Tengah

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang manajemen peningkatan mutu dalam dunia pendidikan khususnya pada Madrasah MAN di wilayah Tapanuli Tengah.
 - b. Sebagai dasar pengembangan penelitian ekstensif tentang manajemen peningkatan mutu di Madrasah MAN wilayah tengah Kabupaten Tapanuli.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi alat bagi guru untuk memahami bahwa meningkatkan kinerja guru sangatlah penting.
 - b. Sebagai sumber informasi manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan dari Madrasah MAN di wilayah Tapanuli Tengah.
 - c. Sebagai sumbangsih penelitian yang cermat, berupa pembaharuan peran mahasiswa sebagai pengalaman yang dapat peneliti gunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Anda dapat

memperoleh informasi dan pengalaman berharga dari penelitian ini, serta sebagai bahan referensi untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN